

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai politik merupakan suatu hal yang menarik, di ruang kelas, warung kopi atau ruang ruang publik lainnya menjadi tempat yang nyaman untuk membahas dunia politik. Tak hanya kalangan generasi tua, generasi muda pun tidak mau kalah dalam menanggapi politik saat ini. Untuk sekedar membahas isu isu politik yang tengah ramai saat ini atau mengenai kebijakan kebijakan pemerintah yang di anggap krusial dan tidak tepat sasaran. Namun hanya beberapa kaum muda saja yang menganggap politik merupakan hal yang menarik untuk di bahas. Sebagian lain menganggap politik hanya untuk kaum kuno atau generasi tua yang tidak menarik untuk menjadi bahan perbincangan.

Era demokrasi saat ini menuntut kawula muda untuk turut berpartisipasi dalam kebijakan-kebijakan yang pemerintah tetapkan guna menciptakan generasi muda yang melek atau peduli dengan tanah airnya. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kesadaran pemuda-pemudi untuk turut andil dan berpartisipasi. Pemerintah mempunyai peran besar untuk menciptakan atau merubah citra politik agar lebih terlihat menarik dan tidak terkesan stagnan.

Generasi muda saat ini sendiri tengah menjadi bahan perbincangan di semua lapisan masyarakat, karena generasi muda yang diharapkan menjadi penerus bangsa atau tonggak bangsa ini tentunya harus mempunyai bekal ilmu. Pentingnya pendidikan politik tak dapat diabaikan, sebab kesadaran politik perlu ditanamkan sejak dini pada generasi muda. Ini menjadi langkah awal yang krusial dalam mengembangkan pemahaman tentang pentingnya ikut serta dalam proses berpartisipasi politik.

Momentum yang paling mencolok dalam politik generasi milenial terjadi saat pemilihan umum (pemilu). Hasil survei yang dilakukan oleh Center of Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan bahwa partisipasi pemilih muda di Indonesia mengalami peningkatan dari pemilu 2014 hingga pemilu 2019. Pada pemilu 2014, sekitar 85,9% dari responden menyatakan mereka telah memilih. Namun, sekitar 11,8% memilih untuk tidak memberikan suara dan 2,3% tidak memberikan jawaban. Pada pemilu 2019, proporsi pemilih yang berpartisipasi meningkat. Sekitar 91,3% dari responden mengklaim mereka telah memilih dalam pemilu 2019, sementara 8% memilih untuk tidak memberikan suara, dan 0,7% tidak memberikan jawaban. Saat ini, pemilih di Indonesia didominasi oleh kalangan anak muda berusia antara 17 hingga 39 tahun. (cindy mutia annur, 2022)

Minat politik dari kalangan kaum muda dapat dianalisis dari berbagai perspektif, dan salah satu indikatornya adalah seberapa sering mereka mengikuti berita politik atau isu-isu kebijakan pemerintah dalam satu hari. Menurut hasil riset yang dilakukan oleh IDN Research Institute yang tertuang dalam laporan "Indonesian Millennial Report 2019," ternyata hanya 23,4 persen dari kaum muda yang menunjukkan minat dalam mengikuti berita politik. Generasi milenial cenderung memiliki pandangan bahwa politik lebih relevan bagi mereka yang lebih tua atau dianggap kuno.

Melihat ciri khas dari generasi milenial yang umumnya cenderung apatis terhadap urusan politik, pendidikan politik menjadi semakin penting. Hal ini mengingat kaum muda atau generasi milenial memiliki peran signifikan sebagai penerus bangsa. Dengan memberikan pendidikan politik yang memadai, diharapkan pandangan dan partisipasi kaum muda dalam ranah politik dapat ditingkatkan, mengingat pentingnya peran mereka dalam membentuk masa depan negara.

Partisipasi politik memiliki peranan yang fundamental dalam sistem demokrasi. Ini menjadi salah satu tanda dari modernisasi dalam ranah politik. Keputusan-keputusan politik yang memiliki dampak signifikan pada kehidupan warga negara diputuskan dan dijalankan oleh pemerintah, seperti yang dijelaskan oleh Slamet (2003). Dalam konteks ini, ada tiga konsep utama partisipasi yang menjadi kunci, terutama ketika terhubung dengan proses pembangunan masyarakat yang berorientasi pada prinsip-prinsip demokratis. Konsep-konsep tersebut adalah partisipasi politik (*political participation*), partisipasi sosial (*social participation*), dan partisipasi warga (*citizen participation/citizenship*).

Partisipasi politik merupakan isu penting dalam analisis politik kontemporer dan telah di pelajari secara eskensif baru baru ini, terutama dalam kaitannya dengan negara negara berkembang. Awalnya kajian partisipasi politik terfokus pada partai politik sebagai aktor utama, namun seiring berkembangnya demokrasi, banyak komunitas berusaha mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan politik secara umum. Gerakan masyarakat baru atau generasi muda kecewa dengan kinerja politik. Kelompok kelompok ini cenderung hanya fokus pada isu isu tertentu dengan harapan dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan secara lebih efektif melalui aksi langsung.

Pengungkapan pandangan masyarakat dengan bebas, baik secara lisan maupun tertulis, harus tetap dijaga agar semua struktur sosial dan lembaga, termasuk infrastruktur dan tata kelola lebih tinggi, tetap terlindungi dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang tidak sesuai dengan niat, tujuan, dan arah dari proses transparansi dalam pembentukan dan penegakan hukum. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya disintegrasi sosial dan sebaliknya, memberikan jaminan akan keamanan dalam kehidupan bersosialisasi. Oleh karena itu, kebebasan berbicara di depan umum harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan prinsip-prinsip hukum internasional yang dijelaskan dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Upaya peningkatan partisipasi politik kaum muda sendiri di Indonesia harus di tempatkan dalam proses transisi bangsa Indonesia menuju sistem politik yang lebih demokratis. Sementara itu, pemerintahan sendiri membutuhkan partisipasi politik bangsa, khususnya generasi muda, sebagai penerus bangsa. Dalam hal ini siswa dan mahasiswa dalam mengawasi pemerintahan agar tetap tidak memihak dan berkomitmen dalam memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat atau warganya. Oleh karena itu generasi muda merupakan komponen penting yang harus dilibatkan dalam pembangunan negara.

Pada zaman ini, kita berada dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), negara kita adalah negara kebangsaan dan negara kesejahteraan yang demokratis, berlandaskan Pancasila. Ketika mengumumkan kemerdekaan dan merancang sistem penyelenggaraan pemerintahan untuk Negara Indonesia yang merdeka, para pendiri republik sadar bahwa bentuk negara kebangsaan dan kesejahteraan yang demokratis merupakan sebuah cita-cita yang diemban sesuai dengan semangat pembukaan UUD 1945. (Soedijarto, 2011)

pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hak untuk mengemukakan pendapatnya, serta memiliki hak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan dalam konteks yang sesuai (Buku Super Lengkap UUD 1945 dan Amandemen, 2016:65).

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebebasan untuk menyuarakan pendapat sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, khususnya pada Pasal 19 yang berbunyi: “ hak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat”.

Era pemerintahan presiden Jokowi dapat terbilang merupakan era pemerintahan yang menempatkan kaum muda di berbagai posisi dalam kabinatnya. Mulai dari kementerian hingga staff khusus kepresidenannya yang ditempati oleh anak muda Indonesia dengan berbagai bakat yang mumpuni, beberapa anak muda Indonesia yang menempati posisi sebagai staff khusus kepresidenan diantaranya yang paling disoroti ialah Putri Tanjung, putri Indahsari Tanjung Kusuma atau akrab di sapa Putri Tanjung ini jebolan sarjana Academy Of Arts di San Fransisco. Dengan umur yang masih menginjak di angka 23 tahun namun kiprahnya tidak bisa diragukan lagi. Putri Tanjung dikenal sebagai *entrepreneur* dan menjadi CEO di *creativpreneur*.

Hal ini kemudian menjadikan era kepemimpinan Jokowi menjadi lebih fresh dan terbilang menarik untuk diamati oleh kaum muda Indonesia. Keterlibatan kaum muda dalam kabinatnya menjadi jembatan untuk kaum muda lainnya dalam menyampaikan aspirasi dan inovasi terbaru.

Dari segi teoritis, negara demokrasi memiliki potensi yang lebih besar untuk mendorong munculnya politisi muda yang dapat berperan dalam posisi teratas partai dan panggung politik nasional. Namun, budaya politik yang belum sepenuhnya demokratis seringkali masih mengandung unsur tradisional di mana politisi senior cenderung mempertahankan kekuasaan mereka. (Azyumardi azra, 2015)

Jagat perpolitikan di Indonesia tampaknya masih dikuasai oleh politisi senior, hal ini kemudian semakin membuat dunia politik terasa kolot dan tidak segar. Perubahannya tidak membuat perpolitikan di Indonesia menjadi lebih baru dan menyesuaikan kaum muda, tapi masih berpegang pada prinsip prinsip usang. Hal ini dapat dikatakan sebagai ketegori dari gerontokrasi.

Gerontokrasi adalah bentuk hubungan sosial tertentu. Secara umum, gerontokrasi merujuk pada masyarakat yang dipimpin oleh individu-individu yang telah memasuki usia tua. Ciri-ciri yang sering terlihat dalam kepemimpinan gerontokrasi mencakup sifat konservatif, lambat dalam perubahan, dan memiliki kecenderungan kaku.

Gerontokrasi yang merugikan bagi demokrasi perlu dikurangi atau setidaknya dikendalikan, jika tidak mungkin dihilangkan sama sekali. Untuk mencapai hal ini, diperlukan kesediaan tulus dari politisi senior untuk memberi ruang kepada regenerasi dalam dunia politik. Dengan cara ini, kita dapat berharap agar demokrasi menjadi lebih sehat dan berdinamika.

Era kepemimpinan presiden Jokowi terdapat beberapa kebijakan yang krusial. Salah satunya diciptakannya UU cipta kerja atau biasa disebut juga UU ciptaker. Kaum muda sebagai *agen of change* tentu menjadi sasaran empuk masyarakat yang merasa dirugikan atas di sahkannya UU cipta kerja tersebut. Dalam hal ini penolakan dari kalangan buruh yang paling gencar menyuarakan penolakan atau kontranya. Apalagi ketika itu banyak draf draf RUU cipta kerja yang berseliweran di masyarakat. Masyarakat serta golongan kaum muda yang dalam hal ini diwakilkan oleh para mahasiswa dan pelajar, menuding pemerintah menghilangkan hak hak pekerja demi memaskan elite perusahaan.

Tingkat penolakan semakin meningkat, aksi demonstrasi beruntun terus dilancarkan di berbagai daerah dengan harapan bahwa pemerintah akan lebih memperhatikan kepentingan para pekerja atau buruh daripada kepentingan elit perusahaan. Presiden Jokowi sempat memberikan instruksi untuk menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan hingga 24 April 2020 dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kembali kepada usulan dari kalangan pekerja. Namun, pada kenyataannya, baik pemerintah maupun DPR bergerak dengan cepat dalam merumuskan undang-undang ini. Bahkan, walaupun dalam masa pandemi, proses pembahasan omnibus law cipta kerja tidak terhenti.

Pada tanggal 5 Oktober 2020, masyarakat dikejutkan oleh pengesahan resmi Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang. Hal ini menimbulkan kesan bahwa prosesnya terlalu terburu-buru. Akibatnya, berbagai aksi massa kembali terjadi. Para buruh dan kaum muda merasa bahwa ada sejumlah kekurangan dalam segi formal dalam proses pembuatan undang-undang ini. Dalam konteks ini, kaum muda memiliki kesempatan untuk menunjukkan eksistensinya dengan mengartikulasikan suara-suara masyarakat, menjadi penghubung antara rakyat dengan kebijakan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut sebagai bahan penelitian untuk memenuhi persyaratan kelulusan. Penelitian ini menitik fokuskan pada minat politik kaum muda dalam menyikapi kondisi politik masa pemerintahan jokowi.

Dengan judul “Analisis minat politik kaum muda dalam menyikapi era pemerintahan jokowi 2019-2022 (Studi kasus pada mahasiswa Jombang)”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas ada banyak penelitian yang membahas terkait minat politik kaum muda, akan tetapi masih sedikit yang membahas terkait minat kaum generasi milenial dalam menyikapi era pemerintahan jokowi. Karena itu, pokok permasalahan yang akan diteliti melalui penelitian ini ialah

1. “bagaimana respon kaum muda dalam menyikapi pemerintahan era jokowi?”
2. “Apa saja faktor faktor yang mempengaruhi minat politik kaum muda ?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menjadi hal penting dalam sebuah karya ilmiah sekaligus menjadi kunci utama untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan penelitian. sebagai berikut

- a. Mengetahui respon kaum muda dalam era pemerintahan jokowi.
- b. Mengetahui faktor faktor apa saja yang mempengaruhi minat politik kaum muda.

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui pada dasarnya manfaat penelitian adalah untuk mengetahui seberapa jauh dan minat politik kaum muda dalam menyikapi pemerintahan masa jokowi.

1. Manfaat Teoritis

- a. Menjembatani penelitian terdahulu, seputar minat politik kaum muda.
- b. Mengetahui faktor faktor pendukung dan penyebab minat politik kaum muda

2. Manfaat Praktis

Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan perubahan atau pengembangan mengenai strategi dalam menjangkau kaum muda agar lebih partisipatif.

E. Sistematika Penulisan

Bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang sebagai uraian tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana minat politik kaum muda dalam menyikapi pemerintahan pada era masa kepemimpinan presiden Jokowi saat ini ?.

Bab 2 kajian pustaka menguraikan tentang penelitian terdahulu, tinjauan pustaka, dan kerangka berpikir, mengenai analisis minat politik kaum muda dalam menyikapi pemerintahan era Jokowi

Bab 3 Metode penelitian membahas tentang metode penelitian sebagai acuan bagaimana mendapatkan data analisis mengenai minat politik kaum muda dalam menyikapi pemerintahan era Jokowi. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Bab 4 Hasil dan pembahasan berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, fokus penelitian, analisis dan interpretasi data.

Bab 5 Penutup, kesimpulan dan saran, berisi jawaban dari rumusan masalah yang dijawab

